



Analisis Kondisi Keuangan Guru Honorer di Jawa Barat dan Implikasinya pada Penggunaan Pinjaman Online

Irfan Nabhani^{1*}, Mikail Omar Nabhani², Liani Asmarani Fitri³
^{1,2,3}Universitas Garut, Indonesia

***email:** irfan.nabhani@uniga.ac.id

Info Artikel

Dikirim: 18 Maret 2024
Diterima: 11 Mei 2024
Diterbitkan: 20 Mei 2024

Kata kunci:

Literasi Keuangan;
Perilaku Pengelolaan
Keuangan;
Pinjaman Online.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisa deskriptif terkait kondisi guru honorer di Jawa Barat dalam pengelolaan keuangan. Hal ini menjadi penting karena guru honorer adalah salah satu ujung tombak pendidikan di tingkat dasar dan menengah yang kesejahteraannya perlu mendapat perhatian. Penelitian ini juga melakukan diskusi dan mengusulkan konsep kerangka penelitian atas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut termasuk keputusan mereka pada saat mengambil pinjaman online. Survey dilakukan secara online pada 68 orang guru honorer yang tergabung dalam asosiasi untuk selanjutnya dilakukan analisa deskriptif. Hasil survey menunjukkan bahwa mayoritas guru honorer memiliki pendapatan yang berada di bawah standar kelayakan hidup sehingga posisi mereka akan rentan terpenetrasi oleh pinjaman online terutama yang ilegal. Penelitian ini mengusulkan konsep penelitian lanjutan dari perilaku keuangan guru honorer daerah dengan mengikutsertakan variabel literasi keuangan, inklusivitas, efisiensi dan inovasi, resiko dan perlindungan nasabah, sekuriti dan kerahasiaan data pribadi, serta legalitas dari pinjaman tersebut.

1. PENDAHULUAN

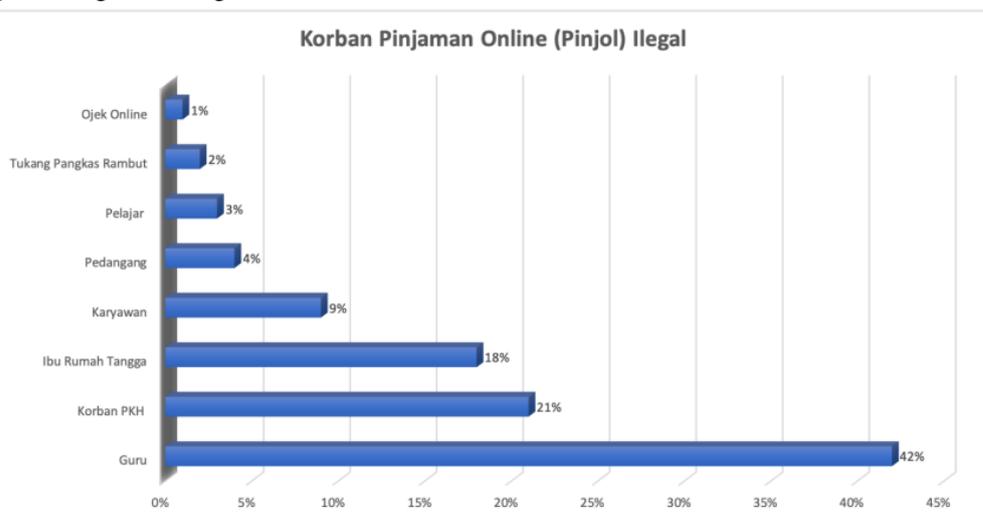
Profesi guru merupakan profesi penentu nasib bangsa karena guru bertugas mendidik anak bangsa, mengubah perilaku dan membangun karakter suatu bangsa sehingga dapat dikatakan kemajuan suatu negara bergantung pada guru [1]. Profesi guru terdiri dari guru pegawai negeri sipil (PNS) dan guru bukan pegawai negeri sipil atau yang sering disebut dengan guru honorer [2], dimana berdasarkan data Kemendikbudristek bahwa 52% dari total guru di Indonesia masih berstatus guru honorer.

Salah satu intervensi kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah Peraturan Pemerintah No 49/2018 mengenai Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang pada tahun 2022 telah mengkonversi 319 orang guru menjadi guru PPPK meskipun masih menyisakan guru honorer yang belum mendapat kesempatan. Kebijakan lainnya dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) menyebutkan bahwa pembayaran honor guru atau tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menggunakan dana BOS paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total dana BOS yang diterima.

Besaran gaji guru honorer yang hanya bersumber dari dana BOS menurut Suhardi (2022) mendapatkan antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- tergantung anggaran sekolah pendapatan tersebut merupakan pendapatansatu-satunya sebagai tenaga pendidik karena guru honorer tidak mendapatkan tunjangan kepegawaian lainnya. Rendahnya kesejahteraan guru honorer dapat menyebabkan konsentrasi guru honorer

terpecah. Guru honorer tetap harus meningkatkan kapasitas mengajarnya dengan terus memperbaiki dan berinovasi mengenai pembelajaran peserta didik. Namun disisi lain, guru honorer memperjuangkan kesejahteraannya dengan menjalankan usaha sampingan atau kegiatan lain seperti mengajar diluar jam sekolah, menjadi pekerja lepas maupun berdagang. Adanya kesenjangan tersebut menimbulkan permasalahan bagi guru honorer dalam hal kesejahteraan, khususnya bagi guru honorer yang telah mengabdikan dalam jangka waktu yang lama hingga puluhan tahun [2]. Kompleksitas permasalahan semakin bertambah dengan adanya faktor keterlambatan pembayaran honor.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah fenomena guru honorer terlilit pinjaman uang, khususnya pinjaman online. Menurut Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) kebanyakan guru yang terjerat pinjaman online (pinjol) adalah guru honorer yang memiliki banyak hutang dan tidak sanggup melunasinya. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 42% masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal berprofesi guru sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Grafik Korban Pinjaman Online Ilegal

Sumber: NoLimit Indonesia

Dikutip dari laman OJK, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen pada periode 2023 memaparkan bahwa hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan dan tekanan kebutuhan hidup [3]. Selain itu, guru cenderung memiliki akses terhadap layanan keuangan digital namun tidak dapat membedakan badan hukum legal dan yang tidak legal. OJK mengungkapkan mayoritas masyarakat menggunakan pinjaman online untuk melunasi utang lainnya. Selain itu, pengguna pinjaman online mendapatkan pencairan lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak, perilaku konsumen, dan tekanan ekonomi. Guru sebagai pendidik dituntut bertindak rasional dan mempunyai kemampuan literasi finansial supaya terhindar dari permasalahan keuangan. ulisan ini bertujuan untuk memberikan analisa deskriptif terkait kondisi guru honorer

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisa deskriptif terkait kondisi guru honorer di Jawa Barat dalam pengelolaan keuangan serta mengusulkan konsep kerangka penelitian lanjutan atas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku guru honorer dalam pengelolaan keuangan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Kajian ini akan menggunakan perspektif pengelolaan arus kas sebagai indikator utama dari kesehatan keuangan yang tergambar dalam bentuk kemampuan pengelolaan dan tindakan penyeimbangan, masukan uang tunai dan pengeluaran [4] termasuk ukuran pembayaran tagihan tepat waktu, pencatatan, penyusunan anggaran keuangan dan perencanaan masa depan.

Komponen-komponen penerimaan dan pengeluaran dalam matriks pengelompokkan arus kas sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Komponen-komponen penerimaan dan pengeluaran

| Jenis Arus Kas | Arus Kas Masuk | Arus Kas Keluar |
|----------------|--|---|
| Operasional | Pendapatan rutin (gaji/upah) dan pendapatan | Pengeluaran konsumtif |
| Investasi | Penjualan asset atau penyertaan | Investasi dalam bentuk deposito atau penyertaan |
| Pembiayaan | Bentuk penerimaan dana dari model pembiayaan | Bunga atau imbal balik dari suatu pembiayaan |
| Saldo | Merupakan sisa penggunaan kas | Saldo tidak bisa defisit |

1) Pendapatan.

Pendapatan merupakan salah satu indikator dalam menentukan kesejahteraan seseorang atau Masyarakat karena merupakan cermin kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Menurut [5] pada dasarnya merupakan hasil atas pengorbanan seseorang dalam bentuk materi untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan, jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Indikator pendapatan dibagi menjadi tiga yaitu pendapatan pokok, pendapatan tambahan dan distribusi pendapatan [6]. Kelayakan pendapatan biasa dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten yang berlaku [7].

2) Konsumsi

Konsumsi adalah pengeluaran oleh rumah tangga maupun individu atas berbagai barang dan jasa. Perilaku pengelolaan keuangan seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia melakukan kegiatan konsumsinya seperti apa yang ia beli seseorang dan alasan mengapa ia membelinya.

3) Tabungan dan Investasi

Tabungan dapat didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi dalam periode tertentu termasuk sebagai dana darurat. Investasi adalah mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini dengan tujuan mendapatkan manfaat di masa mendatang baik dalam bentuk instrumen keuangan maupun instrumen usaha.

4) Manajemen Utang

Manajemen utang adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan utang agar tidak membuat anda mengalami kebangkrutan (*shortage*), atau dengan lain kata yaitu atau pemanfaatan utang untuk menjaga kesejahteraannya.

Selain penggunaan teori pengelolaan arus kas, beberapa penelitian sebelumnya mengangkat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kaitan pinjaman on-line sebagai solusi pembiayaan individu antara lain:

1) Aksesibilitas dan Inklusi

Pinjaman digital dianggap sebagai solusi inovatif karena potensinya untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau populasi yang kurang terlayani. Platform pinjaman digital dapat secara efektif menjangkau peminjam di daerah-daerah terpencil atau yang memiliki akses terbatas terhadap layanan perbankan tradisional, sehingga mendorong inklusi keuangan [8].

2) Efisiensi dan Inovasi

Platform pinjaman digital dapat secara signifikan mengurangi biaya transaksi dan menyederhanakan proses peminjaman, sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih besar [9]. Selain itu, pinjaman digital mendorong inovasi dalam layanan keuangan dengan perannya dalam mendorong pengembangan produk dan model bisnis baru [10].

3) Resiko dan Perlindungan Nasabah

Salah satu potensi risiko yang terkait dengan pinjaman digital adalah terkait perlindungan konsumen dan praktik pinjaman predator sehingga perlu ada regulasi yang kuat untuk memitigasi risiko-risiko ini dan memastikan praktik pinjaman yang adil [9].

4) Keamanan dan Perlindungan Data Pribadi

Pengumpulan dan penggunaan data pribadi dalam pinjaman digital menimbulkan masalah privasi dan keamanan yang signifikan, menekankan pentingnya menerapkan langkah-langkah perlindungan data yang kuat untuk melindungi informasi konsumen dan mencegah akses yang tidak sah [11].

5) Hutang yang berlebihan dan Jebakan Hutang

Kekhawatiran terkait potensi pinjaman digital yang akan menjadi utang yang berlebihan (*indebtedness*), terutama di kalangan masyarakat yang rentan [8]. Tanpa perlindungan peminjam yang memadai dan praktik peminjaman yang bertanggung jawab, individu dapat terjebak dalam siklus utang yang tidak akan pernah selesai.

6) Tantangan Regulasi

Pertumbuhan pinjaman digital yang cepat telah menimbulkan tantangan bagi regulator dalam hal mengimbangi teknologi dan model bisnis yang terus berkembang sehingga perlu adanya kerangka kerja regulasi yang fleksibel yang menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen [12].

7) Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan bagaimana seseorang dalam mengelola keuangan yang mereka miliki. Literasi keuangan adalah kemampuan untuk membuat penilaian informasi dan mengambil keputusan yang efektif dan tentang penggunaan dan pengelolaan uang [13] dan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu guna menghindari masalah dalam keuangan terutama dalam situasi dimana ia harus mengorbankan satu kepentingan demi kepentingan lainnya [14]. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Secara umum meskipun pinjaman digital menawarkan peluang yang signifikan untuk meningkatkan inklusi dan efisiensi keuangan, pinjaman digital juga memiliki risiko yang harus diatasi melalui regulasi yang efektif dan langkah-langkah perlindungan konsumen. Dengan mengelola risiko-risiko ini secara hati-hati, para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan industri dapat memaksimalkan manfaat dari pinjaman digital sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi konsumen dan sistem keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan suatu proses bagaimana seseorang dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilakunya untuk dapat mengelola keuangan dengan baik dan terhindar dari masalah-masalah keuangan yang sering dihadapinya.

Membedakan literasi keuangan ke dalam tiga tahapan yaitu [15]:

- 1) *Well Literate*. Seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki ketrampilan dalam menggunakan produk dan jasa tersebut.
- 2) *Suff Literate*. Kategori ini mengindikasikan seseorang yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- 3) *Less Literate*. Seseorang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- 4) *Not Literate*. Seseorang tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan dua metode secara simultan:

- 1) Analisis Deskriptif terkait kondisi keuangan guru honorer di Jawa Barat dengan menggunakan variable-variabel di bawah ini:
 - a. Kelayakan Pendapatan
 - b. Portofolio Pendapatan

- c. Kecukupan Pemenuhan Kebutuhan Hidup
- d. Investasi
- e. Pinjaman dan Penggunaan Pinjaman Online

Kuesioner disebarakan kepada 68 (enam puluh delapan) responden yang tergabung dalam asosiasi guru honorer Jawa Barat secara acak dengan menggunakan *google form* melalui grup WA dari asosiasi tersebut.

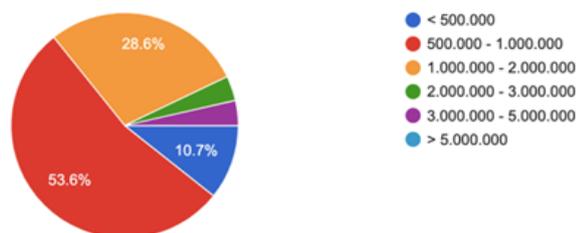
- 2) Diskusi terkait konsep penelitian lanjutan dari perilaku keuangan guru honorer daerah dengan menggunakan elemen-elemen dari kajian literatur untuk digunakan sebagai variable penelitian

Penelitian sebelumnya yang mendukung pada riset ini oleh [16] mengenai Analisis Determinan Perilaku Keuangan Guru Honorer Sekolah Dasar di Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan pada guru honorer memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan, *financial technology* tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap perilaku keuangan guru honorer dan pendapatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan guru honorer. Penelitian mengenai Pengaruh Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan Dan Pendapatan terhadap Kesejahteraan Keuangan Guru Perempuan Di Kota Denpasar. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa literasi keuangan, perencanaan keuangan dan pendapatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan keuangan pada guru-guru perempuan di Kota Denpasar [17]. Novelty dari penelitian ini adalah adanya aspek gaya hidup pada guru honorer dalam perilaku pengelolaan keuangan, dengan literasi keuangan sebagai variabel intervening. Serta subjek dalam riset ini adalah guru honorer dari berbagai jenjang mulai dari guru honorer jenjang TK hingga SMA dan SLB pada sekolah swasta maupun negeri pada wilayah provinsi Jawa Barat yang merupakan populasi guru terbanyak di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berdasarkan respon terkait variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini memberikan hasil sebagai berikut:

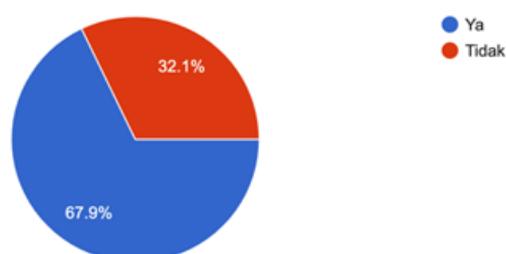
- 1) Besaran Pendapatan



Gambar 2. Pendapatan Perbulan Guru Honorer

Pada Gambar 2 pendapatan perbulan dari Guru Honorer terbesar berada di rentang penghasilan Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000. sebesar 53.6%, selanjutnya berada di rentang penghasilan Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 sebanyak 28.6%. Total sampel berpenghasilan di bawah Rp 2.000.000, adalah sebanyak 92% jika dibandingkan dengan UMK terendah di Jawa Barat sebesar RP 2,1 juta maka pendapatan guru honorer ini jauh dari standar layak jika UMK dijadikan sebagai standar kelayakan pendapatan.

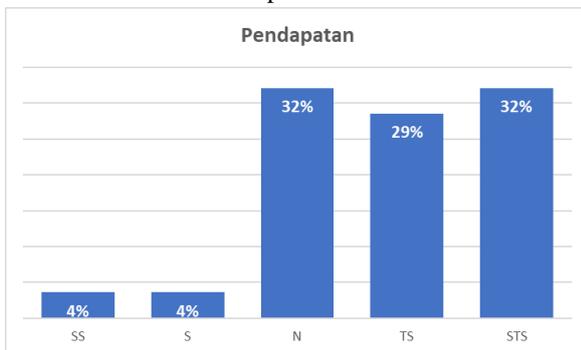
- 2) Portofolio Pendapatan



Gambar 3. Guru Honorer yang Memiliki Sumber Pendapatan Lain

Pada Gambar 3 mayoritas guru honorer (67.9%) memiliki sumber pendapatan lain baik itu dari usaha bisnis, jasa dan lain-lain untuk menutupi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dari honor guru.

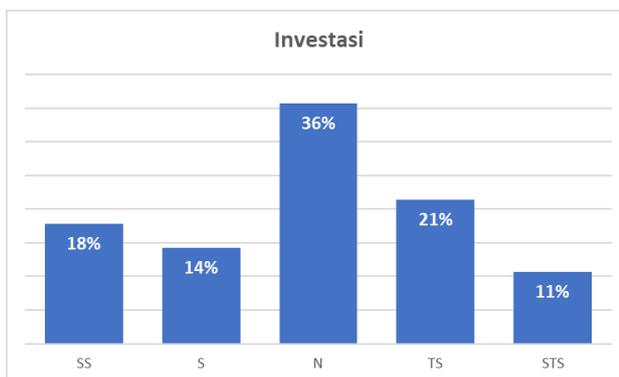
3) Kecukupan dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup



Gambar 4. Kecukupan Pendapatan yang Diterima Guru Honorer

Pada Gambar 4 61% responden berpendapat bahwa pendapatan sebagai Guru Honorer tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sementara 32% menyatakan netral atau tidak tahu.

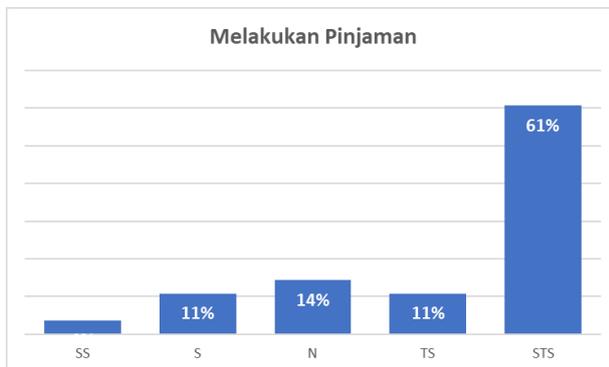
4) Portolio Investasi



Gambar 5. Guru Honorer Melakukan Investasi

Pada Gambar 5 variabel literasi keuangan dijelaskan bagaimana pentingnya suatu investasi. Akan tetapi, pada pra penelitian ini, masih banyak guru honorer yang tidak melakukan investasi sebanyak 9 responden.

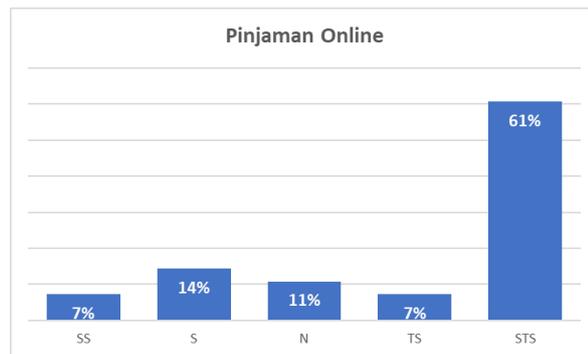
5) Pengelolaan Pinjaman



Gambar 6. Guru Honorer Melakukan Pinjaman Karena Kurangnya Pendapatan

Pada Gambar 6 Kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai guru honorer, sebanyak 15% responden pernah melakukan pinjaman ke jasa keuangan baik bank/koperasi/pinjaman online.

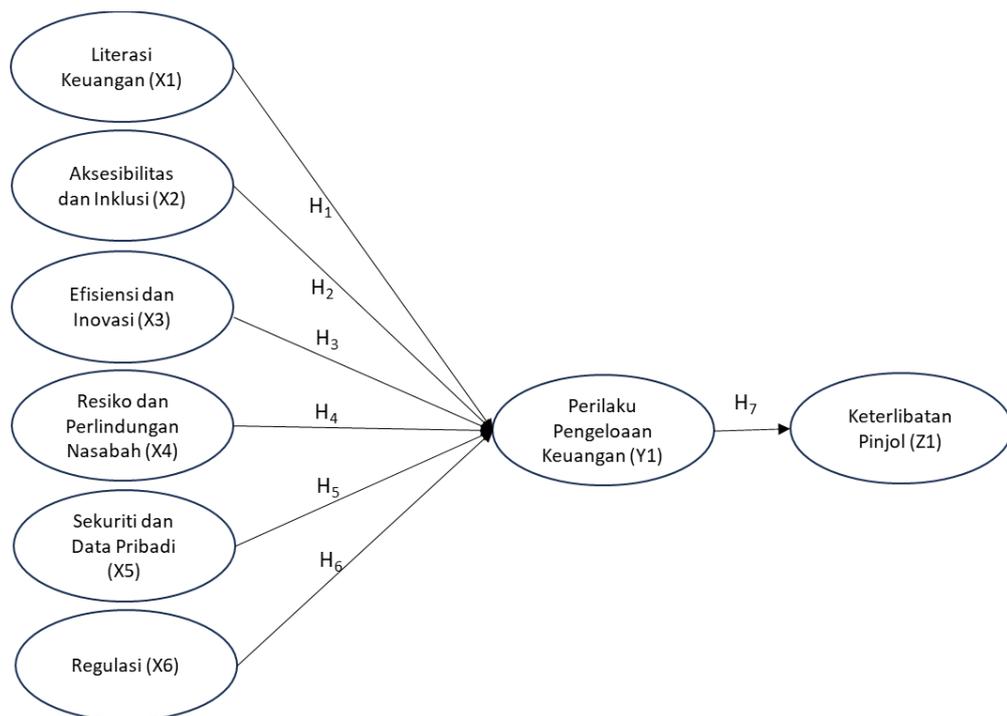
6) Keterlibatan dalam Pinjaman Online



Gambar 7. Guru Honorer Menggunakan Pinjaman Online

Pada Gambar 7 21% responden mengaku pernah melakukan pinjaman online namun belum dijelaskan penggunaan pinjaman tersebut apakah untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan darurat. Fenomena inilah yang mendorong peneliti untuk menganalisis bagaimana hubungan aspek pendapatan, gaya hidup, serta tingkat literasi keuangan pada guru honorer dalam menentukan perilaku pengelolaan keuangannya.

Dari hasil analisa deskriptif di atas dan kajian literatur yang dilakukan, penulis mengusulkan suatu konsep kerangka penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi guru honorer di Jawa Barat dalam pengelolaan keuangannya termasuk penggunaan pinjol sebagai solusi pembiayaan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut pada Gambar 8.



Gambar 8. Kerangka Konseptual Penelitian terkait Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pengelolaan Keuangan Guru Honorer di Jawa Barat

4. KESIMPULAN

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisa deskriptif terkait kondisi guru honorer di Jawa Barat dalam pengelolaan keuangan serta mengusulkan konsep kerangka penelitian atas faktor-faktor yang mempengaruhi

perilaku tersebut termasuk melakukan analisa atas area-area yang memerlukan intervensi baik dalam bentuk kebijakan maupun peningkatan kapasitas.

Guru honorer adalah figur tenaga pendidik yang merupakan salah satu ujung tombak pendidikan di Indonesia, sehingga kesejahteraan mereka harus menjadi salah satu perhatian utama. Analisa deskriptif menyimpulkan bahwa mayoritas guru honorer memiliki standar pendapatan yang tidak memadai ditambah dengan rendahnya literasi keuangan membuat mayoritas dari tenaga pendidik tersebut terjebak dalam pinjaman on-line. Mengacu pada beberapa kajian sebelumnya, kami mengusulkan suatu konsep kerangka penelitian terkait perilaku pengelolaan keuangan dari guru honorer di Jawa Barat melalui pendekatan sektoral.

Diharapkan kajian ini selain bisa mengidentifikasi perlunya peningkatan literasi keuangan secara individu, di sisi lain pemerintah atau badan regulasi juga perlu melakukan intervensi dalam bentuk kebijakan maupun aturan yang akan memposisikan digital lending sebagai solusi yang bisa menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah.

REFERENSI

- [1] S. S. Sabon, P. Suprastowo, D. Suryawati, B. A. Susanto, and I. Mustari, *Profesionalisme Guru Tidak Tetap (GTT) Di Sekolah Negeri*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud, 2017.
- [2] F. Millisani and A. Handayani, "Hubungan antara rasa syukur dan dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis pada guru honorer sekolah dasar di UPT Disdikpora Kecamatan Pamotan ...," *Prosiding Konstelasi Ilmiah ...*, vol. 0, no. 0, Dec. 2021.
- [3] GridFame.id, "Guru jadi Profesi Paling Banyak Terjerat Pinjol Ilegal, Ternyata Begini Modus Jebakan yang Bikin Galbay - Semua Halaman - Grid Fame." Accessed: Mar. 15, 2024. [Online]. Available: <https://fame.grid.id/read/463861141/guru-jadi-profesi-paling-banyak-terjerat-pinjol-ilegal-ternyata-begini-modus-jebakan-yang-bikin-galbay?page=all>
- [4] J. Dew and J. J. Xiao, "The Financial Management Behavior Scale: Development and Validation," *Journal of Financial Counseling and Planning*. Accessed: Mar. 15, 2024. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/256019544_The_Financial_Management_Behavior_Scale_Development_and_Validation
- [5] D. R. Sari, "Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan, Dan Pendidikan Terhadap Keputusan Investasi Keluarga Etnis China Di Surabaya," *Artikel Ilmiah STIE Perbanas Surabaya*, 2020.
- [6] P. F. Mokoginta, "Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Menurut Psak No. 23 Pada CV. NYIUR TRANS KAWANUA," *Jurnal EMBA*, vol. 7, no. Januari, pp. 941–950, 2019.
- [7] T. D. Hardiyanti, "Pengaruh Pendapatan Dan Gaya Hidup Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan," *Repository UIN Sumatera Utara*, 2019.
- [8] A. Banerjee, E. Duflo, R. Glennerster, and C. Kinnan, "The Miracle of Microfinance? Evidence from a Randomized Evaluation," *Am Econ J Appl Econ*, vol. 7, no. 1, pp. 22–53, 2015, doi: 10.1257/APP.20130533.
- [9] S. Agarwal, S. Chomsisengphet, N. Mahoney, and J. Stroebel, "Regulating Consumer Financial Products: Evidence from Credit Cards," *SSRN Electronic Journal*, Aug. 2014, doi: 10.2139/SSRN.2330942.
- [10] S. Bahaj, A. Foulis, and G. Pinter, "Home Values and Firm Behavior," *American Economic Review*, vol. 110, no. 7, pp. 2225–70, Jul. 2020, doi: 10.1257/AER.20180649.
- [11] T. P. Kurnianingrum, "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital," *Kajian*, vol. 25, no. 3, pp. 197–216, 2020.
- [12] A. Moritz and J. H. Block, "Crowdfunding: A Literature Review and Research Directions," *SSRN Electronic Journal*, Jan. 2015, doi: 10.2139/SSRN.2554444.
- [13] B. F. Arianti, "Pengaruh Pendapatan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Melalui Keputusan Berinvestasi Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Akuntansi*, vol. 10, no. 1, pp. 13–36, Apr. 2020, doi: 10.33369/j.akuntansi.10.1.13-36.

- [14] N. Fatimah and Susanti, "Pengaruh Pembelajaran Akuntansi Keuangan, Literasi Keuangan, Dan Pendapatan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik," *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*. Accessed: Mar. 15, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpak/article/view/25273/23161>
- [15] Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas jasa keuangan republik indonesia No 1/POJK.03/2013," *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, pp. 1–82, 2016.
- [16] W. Wahyudi and Y. Tristiarto, "Analisis Determinan Perilaku Keuangan Guru Honorer Sekolah Dasar Di Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang20221101," *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, vol. 6, no. 1, pp. 87–99, 2022.
- [17] A. P. N. Hidayah, I. B. A. Purbawangsa, and N. Abundanti, "Pengaruh Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan Dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Keuangan Guru Perempuan Di Kota Denpasar," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, vol. 10, no. 7, p. 672, Jul. 2021, doi: 10.24843/ejmunud.2021.v10.i07.p03.